



Badiklat
Hukum Sulut

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTA

BADIKLAT HUKUM SULUT
TAHUN 2024



KABADIKLAT HUKUM SULUT

WILUO PEJABONG, S.K., H.H.





RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKIP) Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara Tahun 2024 merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang penyusunannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknik Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Format penyusunan LKIP ini sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. LKIP Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara Tahun 2024 merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta merupakan bagian pertanggungjawaban dalam menggunakan anggaran. LKIP ini menyajikan informasi terkait capaian kinerja dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan dan sasaran strategis sebagaimana diuraikan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan HAM.

RINGKASAN EKSEKUTIF

telah ditetapkan Secaran Strategis yang ingin dicapai pada periode 2020-2024 melalui program Penegakan dan Pelayanah Hukum dengan 2 (dua) Sasaran Kegiatan yaitu :

- Terwujudnya Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah Sulawesi Utara,
- Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara.

Pada tahun 2024, Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara memiliki Tiga (3) indikator kinerja kegiatan yang tertuang pada dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2024. Dari seluruh indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan, telah dilaksanakan dengan baik dengan rincian sebagai berikut:

- Tingkat kepuasan peserta Diklat Hukum dan HAM terhadap penyelenggaraan Diklat Hukum dan HAM Balai Diklat Sulawesi Utara target 3,6 realisasi 3,67;
- Presentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara target 100%, realisasi 100%;
- Indeks kepuasan satuan kerja Lingkup Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara terhadap layanan koordinasi target 3,1 realisasi 3,93.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Realisasi Belanja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara tahun 2024 adalah sebesar Rp. 11.865.335.744 atau 92,56% dari total anggaran Rp. 12.765.457.000. Realisasinya mengalami peningkatan 2,10% dari realisasi belanja tahun 2023 sebesar 10.264.264.438 atau 97,81% dari total anggaran Rp. 10.500.365.000.

Dalam rangka peningkatan layanan Pelatihan yang diberikan kepada Peserta Pelatihan Pegawai pada 10 Kantor Wilayah kerja pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara Tahun 2024 melakukan beberapa inovasi pada layanan pelatihan berupa Aplikasi SITARSIS yang memudahkan registrasi dan database dari peserta Pelatihan.

Upaya pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan telah dilaksanakan di Balai Dilat Hukum dan HAM Sulawesi Utara. Pada tahun 2024 ini, Balai Hukum dan HAM Sulawesi Utara telah berhasil berhasil memperoleh Penghargaan atas Pencapaian sebagai berikut:

RINGKASAN EKSEKUTIF

- Baik dengan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 100 meraih kategori SEMPURNA Triwulan I
- Baik dengan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 293s.d.<100 meraih kategori ISTIMEWA Triwulan II
- Baik dengan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 293s.d.<100 meraih kategori ISTIMEWA Triwulan III

Faktor keberhasilan dari capaian Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara di tahun 2024 adalah komitmen dan pimpinan dari seluruh pegawai untuk melakukan yang terbaik dengan slogan: "KAMI PASTI Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif" menjadikan Balai Diklat Hukum dan HAM Sulut mampu berkinerja dengan baik. Walaupun keterbatasan SDM yang hanya berjumlah 16 (enam belas) pegawai sering menjadi kendala, namun Motivasi Keadilan Sulut "Bersama Kita Bisa" menjadi panyemangat untuk terus bekerja dengan ideal dan tuntas.

Demikian disampaikan LKjP tahun 2024 Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara. Diharapkan laporan ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait dengan penggunaan data dan informasi yang termuat dalam LKjP ini.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	2
B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	3
C. Maksud dan Tujuan	9
D. ASPEK STRATEGIS	14
E. ISU STRATEGIS	15
F. SISTEMATIKA LAPORAN	19
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. RENCANA STRATEGIS	22
B. PERJAKSIAN KINERJA	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	25
B. REALISASI ANGGARAN	26
C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN	27
D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA	41
BAB IV PENUTUP	
A. KESIMPULAN	44
B. SARAN	45
LAMPIRAN	48

BAB I

PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Aspek Strategis
- E. Isu Strategis Balai Pendidikan dan Pelatihan
Sulawesi Utara
- F. Sistematika Laporan



**LKJIP BADIKLAT SULUT
2024**

A. LATAR BELAKANG

Salah satu unsur penting yang harus dimiliki dalam berdirinya suatu organisasi/instansi adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia inilah yang akan mengelola organisasi tersebut agar dapat terus berjalan dan berkembang. Namun agar dapat dikelola dengan baik maka diperlukan sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas. Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara yang merupakan perpariangan dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI di wilayah, bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada para pegawai agar mempunyai kemampuan dan kompetensi yang baik di bidangnya masing-masing. Berdasarkan tugas tersebut maka perlu disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai bentuk pertanggung jawaban atas capaian kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara. Laporan ini diharapkan dapat menjadi sarana penilaian dan perbaikan bagi Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara di masa mendatang.

E. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 04 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Kepala Divisi, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut.

Tugas

Untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia

Fungsi

- penyusunan rencana, program, dan anggaran pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang Hukum dan Hak Asasi manusia;
- pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Dengan mengacu kepada tugas dan fungsi yang diamanatkan serta dengan memperhatikan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024, maka terlihat jelas indikasi bahwa Balai Diklat Hukum dan HAM memiliki peranan penting dalam menjapakan sumber daya manusia aparatur bidang Hukum dan HAM sesuai dengan kualitas, kompetensi dan kapabilitas yang diharapkan untuk menjalankan upaya pencapaian sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM.

Struktur Organisasi

Struktur organisasi Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara terdiri dari:

- 1 (satu) orang Kepala Balai Diklat,
- 1 (satu) orang Kepala Subbagian Tata Usaha,
- 1 (satu) orang Kepala Seksi Pengelenggaraan
- 1 (satu) Kepala Seksi Program dan Evaluasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Hukum dan HAM terdiri dari beberapa fungsi yang memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:



KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA

FETTY H. WANTANIA, S.KOM

NIP. 198305022009012003

Sub bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan kepegawahan, kedisiplinan, anggaran, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, tata kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi, hubungan masyarakat, fasilitasi reformasi birokrasi, pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan, penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara, dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, serta urusan rumah tangga Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia.



KEPALA SEKSI PROGRAM DAN EVALUASI

MUSA PAPARANG, S.E., M.M.

NIP. 197808222010121001

Seksi Program dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan dan penyusunan rencana, program, dan kerja sama, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan hak asasi manusia, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan diklat di wilayah.



KEPALA SEKSI PENYELENGGARA

ABDUL MAID ODE, S.H

NP 197701292003121002

Seksi Penyelenggaraan mempunyai tugas melakukan penyiapan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Содержание Содержание	
1. Введение 1.1. Цели и задачи 1.2. Область применения 1.3. Термины и определения 1.4. Ссылки 1.5. Структура документа	2. Технические требования 2.1. Общие требования 2.2. Требования к оборудованию 2.3. Требования к персоналу 2.4. Требования к документации 2.5. Требования к безопасности 2.6. Требования к экологии 2.7. Требования к надежности 2.8. Требования к качеству 2.9. Требования к срокам 2.10. Требования к стоимости
3. Технические характеристики 3.1. Основные характеристики 3.2. Дополнительные характеристики 3.3. Технические параметры 3.4. Технические условия 3.5. Технические требования 3.6. Технические условия 3.7. Технические требования 3.8. Технические условия 3.9. Технические требования 3.10. Технические условия	4. Технические характеристики 4.1. Основные характеристики 4.2. Дополнительные характеристики 4.3. Технические параметры 4.4. Технические условия 4.5. Технические требования 4.6. Технические условия 4.7. Технические требования 4.8. Технические условия 4.9. Технические требования 4.10. Технические условия

C. NAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah memiliki maksud dan tujuan tertentu yang sangat penting untuk memastikan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional 2020-2024, telah ditetapkan bahwa visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin adalah

"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut dilakukan melalui 9 (sembilan) Misi Pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Sebagai bagian dari pemerintah, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan Presiden dan agenda pembangunan, maka ditetapkan Visi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 adalah "Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

Sejalan dengan penetapan visi Kementerian tersebut, UPSUM Hukum dan HAM melalui Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM sebagai unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM akan menjalankan peran serta menyelenggarakan tugas dan fungsinya dalam upaya pencapaian visi Kementerian tersebut, khususnya dalam berbagai aspek penyiapan dan pengembangan SDM aparatur. Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 6 yaitu penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, misi nomor 7 yaitu perlindungan bagi segenap bangsa dan membenkan rasa aman pada setiap warga negara dan misi nomor 8 yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

Ketiga misi Presiden tersebut ditegaskan kedalam 7 (tujuh) misi Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut:

1. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional
2. Menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas
3. Mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan masyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya
4. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Yang Berkelanjutan.
5. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat
6. Rutin serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan masyarakatan
7. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan.

Tujuan merupakan pengjabatan dari visi dan misi dan juga merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi. Berdasarkan visi, misi serta memperhatikan tata nilai yang ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama tahun 2020-2024 sesuai misinya adalah sebagai berikut:

1. Misi membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional, bertujuan untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah; dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Misi menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas, bertujuan untuk mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima.
3. Misi mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dan korupsi, bermartabat dan terpercaya, bertujuan untuk mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, sekaligus memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan serta membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda

yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia.

4. Misi melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan, bertujuan untuk terlindunginya hak asasi manusia.

5. Misi melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, bertujuan untuk meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan.

6. Misi ini serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan penasyarakan, bertujuan untuk menciptakan wilayah perbatasan yang aman dan perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas-Rutan.

7. Misi melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan, bertujuan untuk mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompetes dan terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM.

D. ASPEK STRATEGIS

Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara, seperti lembaga serupa di daerah lainnya, memiliki aspek strategis yang sangat penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan. Memberikan Pelatihan dan pendidikan kepada aparatur sipil negara (ASN) yang berada di wilayah kerja Balai Pendidikan Hukum dan HAM Sulawesi Utara yang meliputi sepuluh Propinsi yaitu:

1. Propinsi Sulawesi Selatan
2. Propinsi Sulawesi Tenggara
3. Propinsi Sulawesi Tengah
4. Propinsi Sulawesi Utara
5. Propinsi Sulawesi Barat
6. Propinsi Gorontalo
7. Propinsi Maluku
8. Propinsi Maluku Utara
9. Propinsi Papua
10. Propinsi Papua Barat



Dengan jumlah keseluruhan pegawai kementerian wilayah kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM yang tidak sedikit berjumlah 10.866 pegawai yang tersebar di 183 Unit Pelaksana Teknis yang harus mendapatkan pengembangan kompetensi, sehingga peran Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara sangat diperlukan.

E. ISU STRATEGIS BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SULAWESI UTARA

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Manajemen Pegawai Negeri menyatakan bahwa untuk meningkatkan pengembangan karier dan pemenuhan kebutuhan organisasi setiap Aparatur Sipil Negara berhak mendapatkan pengembangan kompetensi. Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara sebagai Unit Pelaksana Teknis BPSPDM Hukum dan HAM berperan penting dalam hal pengembangan kompetensi aparatur Kementerian Hukum dan HAM di wilayah Indonesia amanah yang diberikan melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM yaitu melalui penyelenggaraan pelatihan di wilayah,

Tidak dapat kita pungkiri keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) di Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara saat ini menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan pelatihan. Jumlah pegawai yang ada saat ini Tahun 2024 masih sangat jauh dari idealnya jumlah pegawai suatu lembaga pelatihan yang hanya berjumlah enam belas (16) pegawai, dan jumlah ini masih banyak ketambahan 1 pegawai dibandingkan dengan tahun 2023. Namun, pengembangan kompetensi SDM aparatur sipil daerah saat ini bukan hanya didapatkan melalui pelatihan secara konvensional tetapi juga melalui pemanfaatan teknologi.

Untuk menjawab tantangan tugas pengembangan SDM Hukum dan HAM melalui penyelenggaraan pelatihan yang berkualitas, program-program yang dilaksanakan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara diharapkan mampu meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia di bidang hukum dan HAM di wilayah kerja Badiklat Sulawesi Utara dalam melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya sehingga mampu mendukung kinerja organisasi.

DAFTAR PUSTAKA BALAI DOJAT HIRIKI DAN HAM SINGKAR UTARA
TAHUN 2020

[illegible]

CHART PERAGAN BERDASARKAN DOKUMEN



CHART PERAGAN BERDASARKAN PERSEDIAAN

Persediaan



CHART PERAGAN BERDASARKAN PANGKAT, GOLONGAN

Golongan



40 30 30

F. SISTEMATIKA LAPORAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menyajikan informasi mengenai latar belakang penyusunan LKIP serta tugas, fungsi dan struktur organisasi, maksud dan tujuan, aspek strategis, isu strategis dan sistematika laporan Balai Pendidikan dan Pelatihan Sulawesi Utara.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menyajikan ringkasan mengenai rencana strategis, dan perjanjian kinerja.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini berisi uraian capaian kinerja pada setiap sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran capaian kinerja organisasi, serta perbandingan capaian kinerja. Selain itu disajikan pula akuntabilitas keuangan yang menggambarkan realisasi anggaran dalam mendukung pelaksanaan kegiatan tahun 2024 terkait dengan tugas pokok dan tugas strategis lainnya serta capaian kinerja anggaran.

Bab IV. Penutup

Menyajikan ringkasan simpulan umum atas capaian kinerja Tahun Anggaran 2024 serta strategi pencapaian kinerja yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis (Renstra)

B. Perjanjian Kinerja



LKJIP BADIKLAT SULUT
2024

A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Dalam melaksanakan tugas dan pembangunan di bidang hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM mempunyai visi, misi, dan tujuan Rencana Strategis Tahun 2020-2024. Rencana Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 ini sendiri merupakan panduan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan hukum serta penguatan hak asasi manusia, yang didasarkan pada pemetaan kondisi lingkungan, prioritas nasional, dan isu-isu strategis yang mencakup pembangunan bidang hukum dan hak asasi manusia, yang diintegrasikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian. Sasaran strategis adalah merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai suatu outcome/impact dan beberapa tujuan yang hendak dicapai serta visi misi yang akan diwujudkan. Kementerian menetapkan sasaran strategis tahun 2020-2024 yang dituangkan dalam tabel di bawah sebagai berikut.

Tabel 2. Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM 2020-2024

Penguatan Sektor Strategis		Indikator Kinerja
Penguatan Kapabilitas	Sasaran Strategis 1 (SS1): Memastikan kepastian hukum peraturan perundang- undangan yang sesuai dengan arus pemerintahan nasional perundang-undangan	Indeks kepastian perundang- undangan
	Sasaran Strategis 2 (SS2): Meningkatkan peran dalam penghimpunan, perlindungan, dan pemertahan HAM	1. Persentase diikutinya yang melaksanakan program aksi HAM 2 Persentase instansi daerah yang melaksanakan program aksi HAM
	Sasaran Strategis 3 (SS3): Membantu pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan arus penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum

Sistem Proses Internal	Sasaran Strategi 4 (SS4): Melaksanakan penegakkan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	1. Persentase pemintaan bantuan final baik dalam masalah pidana dan adat/adat yang berhasil ditindaklanjuti 2. Persentase peningkatan penyelesaian pelanggaran kebijakan intelektual secara tuntas 3. Persentase mantan narapidan yang terampil dan berpendidikan 4. Persentase korban mendapatkan perlindungan dan perawatan 5. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang disalurkan berdasarkan putusan yang bertepatan hukum tetap
	Sasaran Strategi 5 (SS5): Rut berpanas serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertahanan NKRI	1. Persentase menurunnya residivis 2. Persentase penegakkan hukum Kriminalisasi yang maksimal
	Sasaran Strategi 6 (SS6): Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat	1. Persentase sosialisasi sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah 2. Persentase permohonan bantuan hukum yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Pembelajaran dan Pertumbuhan	Sasaran Strategi 7 (SS7): Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan HAM Sasaran Strategi 8 (SS8): Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja dan pelayanan	1. Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan 2. Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya 1. Nilai Reformasi Birokrasi 2. Nilai SAKIP 3. Nilai Maturitas SPIP 4. Opini Asia Laporan Keuangan 5. Indeks Persepsi Korupsi

	Sasaran Strategi 9 (SS9): Meningkatkan efektivitas organisasi	Indeks efektivitas organisasi
	Sasaran Strategi 10 (SS10): Meningkatkan pemanfaatan TI untuk layanan hukum dan HAM	Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
	Sasaran Strategi 11 (SS11): Mengoptimalkan pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien	1. Nilai SMART 2. Nilai RPA

Seperti yang tertera dalam tabel diatas, salah satu sasaran Kementerian Hukum dan HAM 2020-2024 yakni Sasaran strategis adalah Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di bidang Hukum dan HAM, (perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan). Dan sebagai implementasi dari bentuk pelaksanaan amanah tugas dan fungsi, serta dukungan bagi upaya pencapaian sasaran strategis tersebut, maka BPSDM Hukum dan HAM menetapkan tujuan strategisnya yaitu Meningkatkan kinerja organisasi Kementerian Hukum dan HAM melalui pengembangan SDM berbasis Corporate University. Arah kebijakan pengembangan SDM di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dalam berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, sebagai penjabaran dari Visi, Program Aksi Presiden dan Wakil Presiden terpilih, serta mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM.

Rencana strategis (Renstray Balai Diklat Hukum dan HAM merupakan turunan dari Rencana Strategis BP5DM Hukum dan HAM 2020-2024. Sasaran Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara merupakan penjabaran dan tujuan yang telah ditetapkan secara spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun atau sepanjang pelaksanaan rencana strategis 2020-2024 ini. Dan dialokasikan secara tahunan

melaui serangkaian program dan kegiatan.

Sasaran strategis disusun melalui pendekatan 4 perspektif *Balanced Scorecard*, yaitu

1. Perspektif Pemangku Kepentingan
2. Perspektif Proses Internal
3. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan
4. Perspektif Keuangan atau Disiplin Anggaran

Sasaran strategis pada perspektif Pemangku Kepentingan mengacu kepada posisi seperti apa yang harus dicapai oleh organisasi di mata para pemangku kepentingannya dalam upaya mencapai tujuan strategisnya. Sasaran strategis pada perspektif Proses Internal akan mengacu kepada bagaimana atau seperti apa yang seharusnya dicapai oleh organisasi dalam hal proses bisnis internalnya dalam upaya mencapai tujuan strategisnya. Sasaran strategis pada perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan mengacu kepada bagaimana atau seperti apa yang seharusnya dicapai dalam hal atribut, karakteristik, atau kinerja SDM dan kelembagaan organisasi dalam upaya mencapai tujuan strategisnya. Sementara itu, sasaran strategis pada perspektif Keuangan atau Disiplin Anggaran akan mengacu kepada bagaimana seharusnya kinerja organisasi dalam hal keuangan atau disiplin anggaran.

Sasaran strategis pada perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan mengacu kepada bagaimana atau seperti apayang seharusnya dicapai dalam hal atribut, karakteristik, atau kinerja SDM dan kelembagaan organisasi dalam upaya mencapai tujuan strategisnya. Sementara itu, sasaran strategis pada perspektif Keuangan atau Disiplin Anggaran akan mengacukepada bagaimana seharusnya kinerja organisasi dalam hal keuangan atau disiplin anggaran. Sasaran strategis Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara dalam empat perspektif tersebut dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3 Sasaran Strategi RPSPDM Hukum dan HAM 2021-2024

Perspektif Sasaran Strategis	Sasaran Strategis
Pemangku Kepentingan	Mewujud Unit Pelaksanaan Teknis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM melalui Kepala Divisi Administrasi utama yang dapat bekerjasama dalam pengembangan kompetensi SDM di bidang Hukum dan HAM dengan paraanggotakepentingan
Proses Internal	1. Menyelenggarakan program pelatihan, pengembangan dan penilaian kompetensi berbasis TI Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021-15 Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Kepulauan Riau Perspektif Sasaran Strategis 2. Menyelenggarakan program pendidikan, pelatihan, pengembangan dan penilaian kompetensi yang berstandar global dan terakreditasi
	3. Mengelola pelatihan yang melibatkan 3 Pihak Pelatthan (AI, Penyelenggara, dan Peserta) 4. Memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang mutakhir 5. Memiliki infrastruktur teknologi informasi untuk pendidikan dan pelatihan SDM yang berkualitas

8. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan proses penyusunan rencana kerja atas apa yang menjadi sasaran strategi demi tercapainya target kinerja yang telah ditentukan. Dokumen Perjanjian kinerja ini berisikan penugasan dari Kepala BPSDM Hukum dan HAM kepada Kepala Balai Diklat Hukum dan HAM untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator dan target.



PERINCIAN KEMERJA TAHUN 2021
KEPALA BALAI DIKLAT FISKAL DAN HUKUM SELAJWESI UTARA
DEMIKAI KEPALA BADAN PENGELOMPOKAN SUPPLI DAYA MANUSIA
HUKUM DAN HAM

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
20	01	01	01
1.	Peningkatan Pelaksanaan Pemeliharaan dan Penguatan Hubungan dan Perekoneksi Masyarakat di Wilayah Sulawesi Utara	Tingkat Kepuasan Peserta Diklat Hukum dan HAM terkait Peningkatan Diklat Hukum dan HAM Model Diklat Berkualitas Utara	2,8
2.	Peningkatan Pelaksanaan Pemeliharaan dan Penguatan Hubungan dan Perekoneksi Masyarakat di Wilayah Sulawesi Utara	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan dan Penguatan Hubungan dan Perekoneksi Masyarakat terkait Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara Indeks Keakuteraan untuk kelompok Badan Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara terkait dengan pelaksanaan	100% 3,1 (maksimal)

No.	Kegiatan	Anggaran
Penyelenggaraan Diklat Aparatur Negara		11.555.497.000,-
1.	Layanan GMB	22.763.000,-
2.	Layanan Hubungan Masyarakat	43.427.000,-
3.	Layanan Protokol	54.631.000,-
4.	Layanan Umum	166.829.000,-
5.	Layanan Perencanaan	3.041.887.000,-
6.	Layanan Sarana Prasarana	1.297.479.000,-
7.	Layanan Manajemen SDM	235.163.000,-
8.	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	6.554.735.000,-
9.	Layanan Perencanaan dan Pengembangan	112.780.000,-
10.	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	314.345.000,-
11.	Layanan Manajemen Keuangan	81.093.000,-
12.	Layanan Reformasi Kinerja	77.356.000,-
13.	Layanan Penyelenggaraan Kelembagaan	6.229.000,-

BAB III

AKUNTABILITA SKINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran
- C. Capaian Kinerja Anggaran
- D. Capaian Kinerja lainnya



LKJIP BADIKLAT SULUT
2023

AKUNTABILITAS KINERJA

Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau ketidak tercapaian pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dimanfaatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi. Pertanggung jawaban tersebut disajikan dalam bentuk laporan yang wajib disampaikan kepada pimpinan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan AparaturNegera dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Revisi Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk memberikan pertanggung jawaban mengenai kinerja sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahunnya.

A. CAPAIAN KERJA ORGANISASI

Berikut output hasil capaian kinerja selama tahun 2023 sesuai dengan sasaran program, indikator kinerja serta target yang telah ditetapkan BPSDM Hukum dan HAM kepada Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara:

Table 5. HLA-DQB1*03:01 allele frequency in the HLA-DQB1*03:01-positive subjects.

[illegible]

No	Fasilitas	Estimasi	Revisi	Persentase
Perbaikan Jalan di 3 Blok Aspal dan Bina		1.184.187.800,-		
1	Jalan di PPH	22.182.800,-	22.182.800,-	99,9
2	Jalan di Masjid Nurul Makrifat	58.121.800,-	58.121.790,-	99,9
3	Jalan di Pribadi di	24.031.800,-	24.031.800,-	100
4	Jalan di Bina	128.020.800,-	128.020.800,-	100
5	Jalan di Perbaikan	2.891.297.800,-	2.891.297.000,-	99,9
6	Jalan di Sana di Bina	1.261.070.800,-	1.261.070.800,-	100
7	Jalan di Masjid Nurul Makrifat	225.101.800,-	225.101.790,-	100
8	Jalan di Perbaikan di Perbaikan	2.224.121.800,-	2.224.121.000,-	99,9
9	Jalan di Perbaikan di Bina	128.180.800,-	128.182.600,-	99,9
10	Jalan di Perbaikan di Bina	111.101.800,-	111.101.500,-	99,9
11	Jalan di Masjid Nurul Makrifat	58.000.800,-	58.000.700,-	99,9
12	Jalan di Bina di Bina	17.180.800,-	17.180.800,-	100
13	Jalan di Perbaikan di Bina	8.120.800,-	8.120.800,-	100

DOI: 10.1002/for

Sl. No.	Particulars	Amount	Page	Page	Page
1	Salaries and Wages	1,00,00,000	1	1	1
2	Grants-in-Aid	50,00,000	2	2	2
3	Subsidies	25,00,000	3	3	3
4	Income Tax	10,00,000	4	4	4
5	Corporate Tax	5,00,000	5	5	5
6	Gift Tax	2,00,000	6	6	6
7	Capital Gains Tax	1,00,000	7	7	7
8	Income Tax	1,00,00,000	8	8	8
9	Corporate Tax	5,00,000	9	9	9
10	Gift Tax	2,00,000	10	10	10
11	Capital Gains Tax	1,00,000	11	11	11
12	Income Tax	1,00,00,000	12	12	12
13	Corporate Tax	5,00,000	13	13	13
14	Gift Tax	2,00,000	14	14	14
15	Capital Gains Tax	1,00,000	15	15	15
16	Income Tax	1,00,00,000	16	16	16
17	Corporate Tax	5,00,000	17	17	17
18	Gift Tax	2,00,000	18	18	18
19	Capital Gains Tax	1,00,000	19	19	19
20	Income Tax	1,00,00,000	20	20	20
21	Corporate Tax	5,00,000	21	21	21
22	Gift Tax	2,00,000	22	22	22
23	Capital Gains Tax	1,00,000	23	23	23
24	Income Tax	1,00,00,000	24	24	24
25	Corporate Tax	5,00,000	25	25	25
26	Gift Tax	2,00,000	26	26	26
27	Capital Gains Tax	1,00,000	27	27	27
28	Income Tax	1,00,00,000	28	28	28
29	Corporate Tax	5,00,000	29	29	29
30	Gift Tax	2,00,000	30	30	30
31	Capital Gains Tax	1,00,000	31	31	31
32	Income Tax	1,00,00,000	32	32	32
33	Corporate Tax	5,00,000	33	33	33
34	Gift Tax	2,00,000	34	34	34
35	Capital Gains Tax	1,00,000	35	35	35
36	Income Tax	1,00,00,000	36	36	36
37	Corporate Tax	5,00,000	37	37	37
38	Gift Tax	2,00,000	38	38	38
39	Capital Gains Tax	1,00,000	39	39	39
40	Income Tax	1,00,00,000	40	40	40
41	Corporate Tax	5,00,000	41	41	41
42	Gift Tax	2,00,000	42	42	42
43	Capital Gains Tax	1,00,000	43	43	43
44	Income Tax	1,00,00,000	44	44	44
45	Corporate Tax	5,00,000	45	45	45
46	Gift Tax	2,00,000	46	46	46
47	Capital Gains Tax	1,00,000	47	47	47
48	Income Tax	1,00,00,000	48	48	48
49	Corporate Tax	5,00,000	49	49	49
50	Gift Tax	2,00,000	50	50	50
51	Capital Gains Tax	1,00,000	51	51	51
52	Income Tax	1,00,00,000	52	52	52
53	Corporate Tax	5,00,000	53	53	53
54	Gift Tax	2,00,000	54	54	54
55	Capital Gains Tax	1,00,000	55	55	55
56	Income Tax	1,00,00,000	56	56	56
57	Corporate Tax	5,00,000	57	57	57
58	Gift Tax	2,00,000	58	58	58
59	Capital Gains Tax	1,00,000	59	59	59
60	Income Tax	1,00,00,000	60	60	60
61	Corporate Tax	5,00,000	61	61	61
62	Gift Tax	2,00,000	62	62	62
63	Capital Gains Tax	1,00,000	63	63	63
64	Income Tax	1,00,00,000	64	64	64
65	Corporate Tax	5,00,000	65	65	65
66					

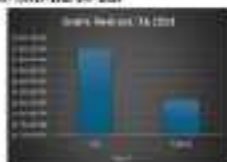
Jika melihat capaian output dari Pelatihan yang sudah dilaksanakan pada 2024 dengan melihat jumlah peserta dan tingkat kelulusan dimana jumlah peserta 4.154 dan yang lulus 3.994 dimana ada 220 orang yang tidak lulus sehingga persentase kelulusan mencapai 94,71%. Namun bila melihat dari target output tahun 2024 sebesar 3440 dan kita jumlahkan peserta pelatihan yang lulus dengan capaian output non pelatihan berjumlah 3.994 maka persentase capaian output menjadi $3.994/3.440 \times 100 = 114,65\%$

3. REALISASI ANGGARAN

Caption Keptari: Analisis Hasil Studi Kasus Hukum dan Sosial Sulawesi Utara

No.	Objek	Anggaran	Realisasi	Persentase
Perencanaan Objek Anggaran Negara		13.305.407.000,-		
1.	Luaran SPN	23.763.000,-	23.743.000,-	99,93
2.	Luaran Hibah, Grant, dan Bantuan	93.427.000,-	93.227.118,-	99,89
3.	Luaran Persepsi	54.801.000,-	54.801.000,-	100
4.	Luaran Umum	125.629.000,-	125.629.000,-	100
5.	Luaran Persewaan	2.081.800.000,-	2.081.210.800,-	99,98
6.	Luaran Sewa Internal	1.287.479.000,-	1.287.479.000,-	100
7.	Luaran Pengajaran SPN	325.103.000,-	325.962.718,-	100
8.	Luaran Pendirian dan Pemeliharaan	6.554.759.000,-	6.552.523.800,-	99,98
9.	Luaran Persewaan dan Persewaan	132.780.000,-	132.532.458,-	99,89
10.	Luaran Persewaan dan Sewa	114.385.000,-	114.385.888,-	99,98
11.	Luaran Persewaan Sewa	88.803.000,-	88.885.702,-	99,98
12.	Luaran Persewaan Sewa	27.206.000,-	27.220.000,-	99,98
13.	Luaran Persewaan Sewa	6.220.000,-	6.220.000,-	100

Realisasi anggaran diatas adalah realisasi anggaran yang diambil per tanggal 31 Desember 2024. Realisasi secara keseluruhan pada tahun 2024 adalah sebesar 99,20%.



Berdasarkan grafik realisasi anggaran perjenis belanja diatas, Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara sebesar Rp. 11,824,481,679, atau 99,20% dari pagu anggaran yang diberikan pada tahun 2024 sebesar 11,919,497,000 pertanggal 31 Desember 2024. Capaian Balai Diklat Hukum dan HAM pada tahun 2024 ini menunjukkan kemampuan melakukan penyerapan anggaran di atas 95% dan meningkat 0.06% dibandingkan dengan tahun 2023 yakni 99.11%.



C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

1. SMART DIA

Aplikasi SMART adalah aplikasi berbasis web yang dibangun guna memudahkan satuan kerja dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran. Aplikasi ini dibangun oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI sebagai alat pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 22/PNK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, evaluasi kinerja anggaran terdiri atas Evaluasi Kinerja Anggaran Reguler dan Evaluasi Kinerja Anggaran Non-Reguler. Evaluasi Kinerja Anggaran Reguler dilaksanakan secara berkala paling sedikit dua kali dalam satu tahun, satu kali untuk tahun anggaran berjalan dan satu kali untuk tahun anggaran sebelumnya. Evaluasi Kinerja Anggaran Reguler terdiri atas:

1. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi: Evaluasi ini dilaksanakan untuk Kinerja Anggaran tingkat unit eselon I dan tingkat satuan kerja dengan mengukur variabel-variabel sebagai berikut:

a. Capaian output Variabel ini terdiri atas Capaian Output Program untuk Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi tingkat unit eselon I dan capaian RO untuk Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi tingkat satuan kerja. Variabel ini diukur dengan membandingkan antara realisasi dengan target indikator Output Program dan Capaian RO. Bobot variabel ini pada aspek implementasi adalah sebesar 43,3 persen.

b. Penyerapan anggaran Variabel ini diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu dalam DPA terakhir. Bobot variabel ini pada aspek implementasi adalah sebesar 28,6 persen.

c. Efisiensi Variabel ini terdiri atas efisiensi Output Program untuk Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi tingkat unit eselon I dan efisiensi RO untuk Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi Tingkat satuan kerja. Efisiensi dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan realisasi anggaran dengan alokasi anggaran. Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk menghasilkan tingkat capaian Output Program atau capaian RO yang telah tercapai berdasarkan alokasi per target yang direncanakan. Sedangkan, realisasi anggaran merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian Output Program atau capaian RO. Bobot variabel ini pada aspek implementasi adalah sebesar 18,2 persen.

d. Konsistensi penyusunan anggaran terhadap perencanaan
Variabel ini dilakukan dengan memperhitungkan deviasi antara realisasi anggaran dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) setiap bulan. Nilai variabel ini pada aspek implementasi adalah sebesar 9,7 persen.

Pada bulan November 2023 nilai SMART Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara 94,01 dengan kualifikasi sangat baik.

Smart 2023

Smart 2023



2. IKPA

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2022, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dan sisi kualitas implementasi. Sub komponen penilaian IKPA yaitu:

- Revisi DIPA : 10 persen.
- Deviasi Halaman III DIPA : 15 persen.
- Penyerapan Anggaran : 20 persen.
- Belanja Kontraktual : 10 persen.
- Penyelesaian Tagihan : 10 persen.
- Pengelolaan UP dan TUP : 10 persen.
- Capaian Output : 25 persen.

Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM sendiri memperoleh nilai IKPA 99,81 data bulan Desember 2024, dimana masih perlu pertaikan pada pengurangan UP dan TUP, namun jika dibandingkan dengan IKPA bulan Desember 2023 yang memperoleh nilai IKPA 98,54, nilai IKPA tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 1,27 poin.

IKPA 2023



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Kantor Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jakarta Pusat

REKAPITULASI HASIL PENYERAPAN

Revisi DIPA 2024

No	Kode	Uraian	Kategori	Kategori	Kategori	Indikator Kinerja Utama						Kategori	Kategori	Kategori
						Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama			
1	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
2	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
3	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03
4	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04
5	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05
6	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06
7	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07
8	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08
9	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39
40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47
48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49
50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51
52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57
58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59
60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61
62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66
67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67
68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68
69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69
70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71
72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72
73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73
74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74
75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77
78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78
79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79
80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81
82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82
83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84
85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86
87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88
89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89
90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91
92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92
93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93
94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97
98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98
99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100



REKAPITULASI HASIL KINERJA

Halaman 1 dari 1

No	Kategori	Sub Kategori	Indikator	Target	Tercapai (Target)				Tercapai (Realisasi)		Tingkat Pencapaian (%)	Catatan
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	Kelembagaan	Struktur Organisasi	Struktur Organisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
8	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
9	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
10	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

Selain Capaian diatas Balai Pendidikan Hukum dan Ham Sulawesi Utara juga mempunyai capaian kinerja lainnya, yaitu

1. E-Performance

E-Performance adalah aplikasi system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja. Aplikasi ini menampilkan proses perencanaan kinerja, penganggaran kinerja, keterkaitan kegiatan/sub kegiatan dalam pencapaian target kinerja dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja keuangan. Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Ham Sulawesi utara sudah mencapai 100% dalam pemaparannya seperti pada gambar



2. E- Monev BAPPENAS

E-Monev BAPPENAS adalah aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan intervensi pemerintah pusat (kenga ku) Kementerian/Lembaga, Badan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Ilmu Sulawesi Utara sudah melaporkan e-monev dari bulan Januari 2024-Desember 2024 (gambar)



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran



LKJIP BADIKLAT SULUT
2024

A. KESIMPULAN

Sebagai Satuan Kerja BPSDM Hukum dan HAM yang mempunyai tugas sebagai penyelenggara pelatihan di wilayah, Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi serta target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Target sasaran kegiatan Tahun 2024 dalam dokumen perjanjian kinerja dengan telah terealisasi sesuai dengan target.
- Persentase realisasi anggaran Tahun 2024 per 31 Desember 2024 sebesar 99,20% naik 6,09% dari tahun 2023.
- Capaian Output pelatihan Tahun 2024 sebanyak 3.944 orang ini dari target output pelatihan 3.440 orang menunjukkan kenaikan output mencapai 11,6% dibandingkan dengan tahun 2023 sebanyak 3.170 orang. Perbedaan jumlah output tersebut karena pada tahun 2024 ini ada Webinar Kepegowaaian yang mempunyai target output 1.412 orang
- Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 bulan Desember 99,81

E. SARAN

Adapun saran untuk meningkatkan kinerja organisasi, yaitu:

- Perlu adanya penegasan kembali kepada peserta, bahwa pelatihan yang dilakukan secara dislance learning/ pembelajaran jarak jauh memiliki aktifitas yang sama halnya dengan pelatihan secara klasikal, dimana peserta diuntut untuk aktif dalam setiap proses pembelajaran mulai dari tatap muka secara virtual, penugasan, hingga evaluasi pembelajaran sehingga tetap dibutuhkan perhatian dan konsentrasi dalam mengikuti pelatihan tersebut.
- Secara aktif atasan/pimpinan pada unit/satuan kerja melakukan pengawasan serta memberikan dukungan fasilitas kepada pegawainya yang sedang mengikuti pelatihan apa dalam pelaksanaan pelatihan pegawai dapat menyelesaikan dengan hasil yang terbaik.
- Meningkatkan kepatuhan terhadap rencana realisasi anggaran disetiap triwulan dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal dan metode yang disusun.
- Adanya penambahan SDM/pegawai di Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara sesuai dengan kebutuhan guna meningkatnya kinerja organisasi.

LAMPIRAN



LKJIP BADIKLAT SULUT
2023

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 KEPALA KALAUHUKAT KURUM DAN HAM SULAWESI UTARA

Salah tugas pokok dan tanggung jawab pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, serta yang berkeadilan bagi masyarakat.

Nama : Hery, Pribadi

Jabatan : Kepala Dinas Dinas Hukum dan HAM Sulawesi Utara

Sebagai pihak dalam perjanjian

Nama : Iwan Rudianto

Jabatan : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM

Sebagai pihak dalam perjanjian, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan melaksanakan tugas kinerja yang akan tertera sesuai dengan capaian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, pelaksanaan dan kegiatan pencapaian target kinerja sesuai dengan tanggung jawabnya

Pihak kedua akan melakukan kegiatan yang diperlukan untuk akan melaksanakan sesuai dengan target kinerja dan capaian ini dan mengaitkan bentuk yang dapat diukur untuk kegiatan pencapaian dan capaian

Salah, 30 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Hukum dan HAM

Pihak Pertama,
Kepala Dinas Dinas Hukum dan HAM
Sulawesi Utara

Iwan Rudianto
NIK. 190402191980111001

Iwan Rudianto
NIK. 181218051980311001

PERUNTUKAN RUMAH KUNYU 2020
 KEMALAH KUALITAS LAYANAN KUNYU DAN HIMPUNAN SPESIAL UTAMA
 DAN KUALITAS LAYANAN KUNYU DAN HIMPUNAN SPESIAL UTAMA
 KEMALAH KUALITAS LAYANAN KUNYU DAN HIMPUNAN SPESIAL UTAMA

No.	Item/Category	Indikator Kinerja	Tipe
1.	1.	2.	3.
1.	Indikator Kinerja Utama Pelayanan dan Kualitas Kualitas dan Jumlah Pelayanan dan Jumlah Pelayanan	Indikator Kinerja Utama Kualitas dan Jumlah Pelayanan dan Jumlah Pelayanan	1.1
2.	Indikator Kinerja Utama Pelayanan dan Kualitas Kualitas dan Jumlah Pelayanan dan Jumlah Pelayanan	Indikator Kinerja Utama Kualitas dan Jumlah Pelayanan dan Jumlah Pelayanan	1.2

No.	Item/Category	Anggaran
1.	Anggaran Utama	1.100.000.000
2.	Anggaran Pelayanan	1.100.000.000
3.	Anggaran Pelayanan	1.100.000.000
4.	Anggaran Pelayanan	1.100.000.000
5.	Anggaran Pelayanan	1.100.000.000
6.	Anggaran Pelayanan	1.100.000.000
7.	Anggaran Pelayanan	1.100.000.000
8.	Anggaran Pelayanan	1.100.000.000
9.	Anggaran Pelayanan	1.100.000.000
10.	Anggaran Pelayanan	1.100.000.000
11.	Anggaran Pelayanan	1.100.000.000
12.	Anggaran Pelayanan	1.100.000.000

Wong, 16 Januari 2021

Presiden
Rencana Strategis Pembangunan
Zona Merah Putih (RPPM)



Riza H. Satrio
NIP. 196001198011001

Presiden
Rencana Strategis Pembangunan
Zona Merah Putih (RPPM)



Widiyandono
NIP. 19721210198011001



PERJUALAN KIBRAH TAHUN 2022

KAPALA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN HAM BALAJARI UTARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, berlandaskan target dibawah ini :

Nama : Wahyu Priwardono

Jabatan : Kepala Balai Pendidikan dan HAM Balajarai Utara

Sebagai salah satu pencapaian target kinerja yang sah dan sesuai dengan lingkup pekerjaan ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan,

Kepribadian dan keagungan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Batang, 2 Januari 2022

Kepala Balai Pendidikan dan HAM
Balajarai Utara

Wahyu Priwardono
NIP. 1971101011988031001



UNIVERSITAS PENDIDIKAN
INDONESIA
Jalan Setiabudi No. 221
Bandung 40132

Piagam Penghargaan

Waktu Validasi: 01/01/2023 - 31/12/2023

diangkat sebagai salah satu

Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara
Kode Saker 409198

atau ekwivalennya dengan nilai Indeks Kinerja Pelaksanaan Kegiatan
IPK 12.000 yang telah tercapai **100%**

Number Token: 501



Nuri Utami
Kode Saker 409198



Denny Sumarto
Kode Saker 409198



UNIVERSITAS PENDIDIKAN
INDONESIA
Jalan Setiabudi No. 221
Bandung 40132

PIAGAM PENGHARGAAN

Waktu Validasi: 01/01/2023 - 31/12/2023

diangkat sebagai salah satu

BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN HAM
SULAWESI UTARA

Kode Saker 409198

atau ekwivalennya dengan nilai Indeks Kinerja Pelaksanaan Kegiatan
Anggaran (IPA) 12.000 yang telah tercapai **100%**

NEW ULAMITAN 2023



Nuri Utami
Kode Saker 409198



Denny Sumarto
Kode Saker 409198



PIAGAM PENGHARGAAN

KELOMPOK MAHASISWA STUDI KEMAJUAN

Universitas
**BAHAI PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN HUKUM DAN HAM
SULAWESI UTARA**

KEPADA

SAHABAT MAHASISWA KEMAJUAN

DESIANA

KELOMPOK MAHASISWA KEMAJUAN



Hasil Absensi



Demikian, ini dibuat
di Makassar, 21 Desember 2023



Universitas Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM
Sulawesi Utara

PIAGAM PENGHARGAAN

KELOMPOK MAHASISWA STUDI KEMAJUAN

KEPADA

DESIANA

KELOMPOK MAHASISWA STUDI KEMAJUAN

Keanggotaan Terdaftar

KEPADA

SAHABAT MAHASISWA KEMAJUAN

KEPADA

DESIANA

KELOMPOK MAHASISWA STUDI KEMAJUAN

KELOMPOK MAHASISWA STUDI KEMAJUAN

KELOMPOK MAHASISWA STUDI KEMAJUAN

KELOMPOK MAHASISWA STUDI KEMAJUAN

KELOMPOK MAHASISWA STUDI KEMAJUAN

KELOMPOK MAHASISWA STUDI KEMAJUAN

KELOMPOK MAHASISWA STUDI KEMAJUAN

KELOMPOK MAHASISWA STUDI KEMAJUAN

KELOMPOK MAHASISWA STUDI KEMAJUAN

KELOMPOK MAHASISWA STUDI KEMAJUAN

KELOMPOK MAHASISWA STUDI KEMAJUAN

KELOMPOK MAHASISWA STUDI KEMAJUAN

KELOMPOK MAHASISWA STUDI KEMAJUAN

KELOMPOK MAHASISWA STUDI KEMAJUAN

KELOMPOK MAHASISWA STUDI KEMAJUAN

KELOMPOK MAHASISWA STUDI KEMAJUAN

KELOMPOK MAHASISWA STUDI KEMAJUAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENGHARGAAN

KEHIMPUNAN SARAF DAN CAKUPAN 2024

(KESKAD 2024)

SALAM PENGHARGAAN DAN POLAHATI SULAFTIS ETARA

Salah satu kearifan budaya bangsa yang telah diakui sebagai warisan budaya

Pada tanggal 20 Mei 2024

di ITS

Salah satu kearifan budaya bangsa yang telah diakui sebagai warisan budaya

Salah satu kearifan budaya bangsa yang telah diakui sebagai warisan budaya

Pada tanggal 20 Mei 2024
di ITS
Salah satu kearifan budaya bangsa yang telah diakui sebagai warisan budaya



Salah satu kearifan budaya bangsa yang telah diakui sebagai warisan budaya

© 2024 Institut Teknologi Semarang



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENGHARGAAN

KEHIMPUNAN SARAF DAN CAKUPAN 2024

(KESKAD 2024)

SALAM PENGHARGAAN DAN POLAHATI SULAFTIS ETARA

Salah satu kearifan budaya bangsa yang telah diakui sebagai warisan budaya

Pada tanggal 20 Mei 2024

di ITS

Salah satu kearifan budaya bangsa yang telah diakui sebagai warisan budaya

Salah satu kearifan budaya bangsa yang telah diakui sebagai warisan budaya

Pada tanggal 20 Mei 2024
di ITS
Salah satu kearifan budaya bangsa yang telah diakui sebagai warisan budaya



Salah satu kearifan budaya bangsa yang telah diakui sebagai warisan budaya

© 2024 Institut Teknologi Semarang





KONTRIBUSI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TERBIMBANG BERKORPORASI
KANTOR INTI KEMENTERIAN HUKUM DAN KAN SULAWESI UTARA
SALAT PENGEDOKAN DAN POLYTERBAH HUKUM DAN SIK H. SULAWESI UTARA
Aulis Marnanto-Ner dan Kertika Digerat Dita Mariani Kana Dikang
email : kurtika@baktikarmas.com@gmail.com

BerAKHLAK
SINERGI KEADILAN



SEKOLAH
PASTI

INFORMASI
HUKUM



PEMAJUAN
SINERGI KEADILAN



baktikarmasnews



Bakti Karmas Sulut



@dikikarmasnews